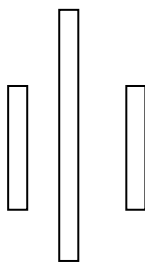
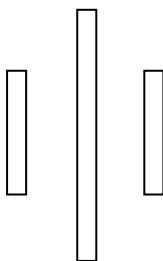




**PEDOMAN TEKNIS
EVALUASI INTERNAL**



TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Pedoman Teknis Evaluasi Internal Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dokumen ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Capaian indikator kinerja ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya dokumen ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara terukur, berkelanjutan dan mampu mendorong ketahanan daerah Tabanan .

Tabanan, 4 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 2

BAB II PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA..... 3

 2.1 Pengukuran SPM 3

 2.2 Pengukuran IKD 3

 2.3 Pengukuran IKT..... 3

 2.4 Pengukuran IKU 3

 2.5 Pengukuran IKP 4

 2.6 Pengukuran IKK 4

 2.7 Pengukuran IKS 4

BAB III PENUTUP 5

 3.1 Kesimpulan 5

 3.2 Saran..... 5

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berAKHLAK.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program prioritas maka setiap triwulan dilakukan pengukuran dan capaian indikator kinerja perangkat daerah di BPBD.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/601/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

1.3. Tujuan.

Tujuan dari pelaporan ini adalah memberikan informasi pedoman evaluasi indikator kinerja :

- a. Indikator Kinerja SPM
- b. Indikator Kinerja Indeks Kinerja Daerah
- c. Indikator Kinerja Tujuan
- d. Indikator Kinerja Utama
- e. n Indikator Kinerja Program
- f. Indikator Kinerja Kegiatan
- g. Indikator Kinerja Sub Kegiatan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pengukuran Indikator Kinerja SPM Sub Bencana

Pengukuran kinerja SPM yang tertuang pada Bab VIII RPJMD tentang IKU pemerintah daerah nomor 1. Pengukuran SPM ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran SPM Sub Urusan Bencana

SPM	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Jumlah realisasi pelayanan kebencanaan dibagi target layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretriati

2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Pengukuran kinerja IKD yang tertuang pada Bab VIII RPJMD ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.12 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah layanan cepat kebencanaan dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekreatriati

2.3 Pengukuran indikator Kinerja Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan. Adapun *stakeholder* (Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Sosial P3A, Dians Perhubungan) yang berperan dalam pencapaian indikator menurunkan Indeks Risiko Bencana yang dikukur dari evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD yang nilainya dikeluarkan oleh BNPB. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tabel 2.1 Pengukuran Indikator Tujuan

Tujuan BPBD	Indikator tujuan	Formula	Target
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian dari BNPB	147,42
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00

2.4 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun targetnya berikut ini.

Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai rewiu LKjIP dari Inspektorat	A (81)

2.5 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja program. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun targetnya berikut ini.

Tabel 2.3 Pengukuran Indikator Program

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran pelayanan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program	Persentase penanganan	Realisasi	100%

Penanggulangan Bencana	prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	penanganan bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	
------------------------	---	--	--

Sumber : DPA, 2024

2.6 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerjanya berikut ini

Tabel 2.4 Pengukuran Indikator Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target KInerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca becana setahun	1 dok
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum	100%

	BPBD	dikalikan 100	
Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Prosentase terpenuhinya pengadaan BMD	Realisasi pengadaan BMD dibagi target perencanaan pengadaan BMD dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjang dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

2.7 Pengukuran Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerjanya berikut ini

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Klinerja
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun		
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA dihasilkan	2 dokumen
• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja i nstansi pemerintah dihasilkan	1 laporan
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD		
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang menerima gaji dan tunjangan setahun	14 orang
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Jumlah laporan keuangan keuangan yang dihasilkan	2 laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD		
• Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket komponen instanlasi listrik untuk	1 paket

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penerangan kantor disediakan	
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga penunjang pelayanan kantor disediakan	1 paket
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah logistic kantor penunjang pelayanan kantor disediakan	1 paket
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan pengagndaan penunjang pelayanan kantor disediakan	2 paket
• Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Jumlah paket bahan material penunjang pelayanan kantor disediakan	3 paket
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi kebijakan penanggulangan bencana ke pusat dilaporkan	2 laporan
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip triwulanan dilaporkan	4 dok
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor		
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penggunaan materai untuk administrasi perkantoran	12 laporan
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penggunaan listrik, air dan telepon untuk menunjanag pelayanan perkantoran	3 laporan
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum untuk menunjanag pelayanan publik	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor		
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda dua, roda empat, dan roda enam yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan kerja penunjnag operasional administrasi terpelihara baik	16 unit
Pelayanan Informasi	Jumlah daerah yang		

Rawan Bencana Kabupaten/Kota	meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi KIE mitigasi bencana untuk ketangguhan bencana	10 kec
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana		
• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbangun dan disahkan oleh Perbekel	2 desa di kawasan rawan bencana
• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah aparatur dan warga negara (siswa) yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100 orang
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
• Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDP yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan dokumen kaji cepat	Jumlah dokumen SK penetapan tanggap bencana berdasarkan dokumen kaji cepat kebencanaan	2 SK
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana setahun	
• Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Jumlah dokumen permohonan dana pasca bencana yang diverifikasi setahun	1 dok

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

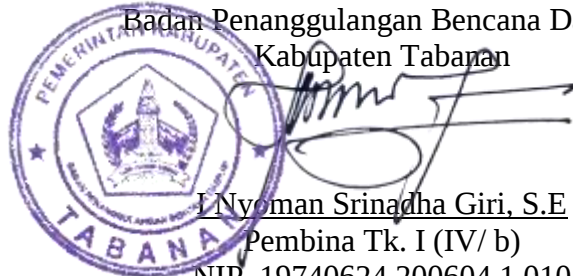
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan amanah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berpedoman pada pengukuran evaluasi internal atas Indikator SPM sub Bencana, indikator kinerja tujuan daerah, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja sub kegiatan.

3.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi lintas instansi dan masyarakat pemerhati kebencanaan untuk penguatan kapasitas masyarakat rawan bencana.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

